

Dukungan Spanyol untuk Armada Sumud Bisa Menjadi Titik Balik dalam Penghancuran Gaza oleh Israel

Selama hampir dua tahun, dunia telah menyaksikan apa yang secara luas digambarkan sebagai salah satu kampanye penghancuran paling sistematis dan brutal terhadap populasi sipil dalam sejarah modern. Gaza – sebuah enklave yang padat penduduknya dengan lebih dari dua juta warga Palestina – telah berada di bawah pengepungan hampir total sejak Oktober 2023. Infrastrukturnya telah hancur, akses terhadap air dan listrik dibatasi, dan penduduk sipilnya menghadapi pemboman berulang, pengusiran, dan kelaparan.

Semakin banyak, opini publik global dan lembaga hukum internasional mulai menyebut ini apa adanya: **genosida**. Mahkamah Internasional (ICJ), dalam tindakan sementara pada tahun 2024 dan pendapat penasihat berikutnya, memutuskan bahwa kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat melanggar beberapa pasal dari **Konvensi Genosida, Konvensi Jenewa Keempat**, dan **hukum internasional adat**. ICJ lebih lanjut menetapkan bahwa **pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal** dan bahwa negara-negara anggota memiliki **kewajiban untuk memastikan tidak adanya pengakuan dan bantuan terhadap situasi ilegal ini**.

Meskipun ada putusan hukum yang jelas ini, Israel terus melanjutkan kampanye militernya – didorong oleh puluhan tahun **impunitas diplomatik**, perisai veto di PBB, dan dukungan kuat dari negara-negara Barat yang kuat, terutama Amerika Serikat. Hasilnya: dunia sebagian besar hanya berdiam diri sementara Gaza telah diratakan menjadi puing-puing.

Kini, perhitungan itu mungkin akan berubah.

Pengganggu di Halaman Sekolah Bertemu Lawannya

Selama beberapa dekade, Israel telah bertindak seperti pengganggu di halaman sekolah dalam sistem internasional – mendorong batas-batas, mengabaikan putusan, dan meningkatkan ketegangan dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Sikap ini telah diperkuat oleh aliansinya dengan Washington, superioritas militer regionalnya, dan pencegah nuklir yang tidak diakui secara resmi. Namun, sikap ini juga telah menumbuhkan **arogansi** – keyakinan bahwa tindakan apa pun, betapapun sembrono atau ilegal, tidak akan memicu respons internasional yang sebanding.

Keputusan Israel untuk **menyerang kepentingan diplomatik Qatar** awal tahun ini dianggap secara luas sebagai salah satu provokasi paling bodohnya. Namun, apa yang kini mengintai mungkin melampaui itu: **serangan potensial Israel terhadap Armada Sumud** – konvoi multinasional kapal-kapal yang berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Di antara kapal-kapal yang berpartisipasi adalah yang berlayar di bawah **bendera Spanyol**, membawa **warga Spanyol** – termasuk pejabat terpilih, pekerja bantuan, dan jurnalis.

Jika Israel menyerang kapal-kapal ini dengan kekuatan mematikan, hal itu bisa memicu serangkaian peristiwa yang secara dramatis mengubah lanskap geopolitik dan hukum – dan mungkin memaksa Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, **meninggalkan tidak hanya pengepungan Gaza tetapi juga pendudukan Tepi Barat**.

Domino Hukum Mulai Jatuh

Langkah 1: Serangan terhadap Kapal Sipil – Pasal 51 Piagam PBB

Jika pasukan Israel menyerang **kapal-kapal sipil berbendera asing** di laut lepas – terutama di perairan internasional – ini akan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, termasuk:

- **UNCLOS** (Konvensi PBB tentang Hukum Laut)
- **Hukum maritim internasional adat**
- **Manual San Remo** tentang hukum internasional yang berlaku untuk konflik bersenjata di laut.

Yang lebih penting, **Pasal 51 Piagam PBB** menyatakan:

“Tidak ada dalam Piagam ini yang dapat merusak hak bawaan untuk membela diri, baik secara individu maupun kolektif, jika terjadi serangan bersenjata terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa...”

Jika Spanyol menentukan bahwa serangan Israel terhadap kapal-kapalnya merupakan serangan bersenjata – terutama jika warga sipil tewas – mereka dapat mengacu pada **pembelaan diri individu** di bawah Pasal 51. Selain itu, pengaktifan ini dapat mengundang **pembelaan diri kolektif**, di mana **negara lain secara sukarela mendukung hak Spanyol untuk merespons**.

Negara-negara seperti:

- **Turki** (anggota NATO dengan keluhan historis dan persaingan strategis regional dengan Israel),
- **Indonesia** (yang baru-baru ini menyatakan kehendak politik untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian di Gaza di bawah mandat PBB),
- **Yaman** (yang sudah terlibat dalam tekanan maritim asimetris terhadap pelayaran Israel di Laut Merah),

...dapat menyatakan dukungan mereka untuk klaim pembelaan diri Spanyol. Ini menciptakan **kerangka koalisi hukum** untuk operasi maritim, udara, dan kemanusiaan

terbatas di bawah prinsip **pembelaan diri kolektif** – bahkan tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB.

Langkah 2: Serangan terhadap Kapal Militer – Pasal 5 NATO

Jika situasi semakin meningkat – misalnya, jika pasukan Israel **menyerang kapal perang Spanyol atau Turki** – perhitungan hukum dan politik berubah secara menentukan.

Berdasarkan **Pasal 5 Perjanjian NATO**, serangan terhadap **pasukan, kapal, atau pesawat** salah satu anggota di wilayah operasi yang ditentukan oleh **Pasal 6** (termasuk Mediterania) dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Spanyol dan Turki kemudian dapat **secara resmi mengaktifkan Pasal 5**, yang memicu mekanisme respons kolektif.

Meskipun NATO beroperasi berdasarkan konsensus dan setiap negara anggota mempertahankan fleksibilitas dalam kontribusinya, pengaktifan Pasal 5 **mewajibkan konsultasi dan solidaritas**. Bahkan jika **Amerika Serikat** dan **Jerman** – keduanya sangat terkait dengan Israel – memilih untuk tidak ikut bertempur, kecil kemungkinan mereka akan **memblokir** anggota NATO lain untuk bertindak, terutama mengingat keharusan yang terus berlanjut untuk **menjaga kesatuan aliansi terkait Ukraina**.

Dari Pengawasan Maritim ke Mundur Strategis

Sebagai respons, koalisi multinasional yang dipimpin NATO – kemungkinan besar berpusat pada **Spanyol, Prancis, Turki, dan Italia**, dan didukung oleh negara-negara simpatik lainnya – dapat dengan cepat membentuk:

- **Koridor maritim kemanusiaan ke Gaza**
- **Patroli pertahanan udara dan laut di perairan timur Mediterania**
- **Mekanisme komando bersama untuk operasi pencarian dan penyelamatan serta perlindungan konvoi**

Angkatan laut dan udara Israel, meskipun canggih dan dominan secara regional, secara realistis tidak dapat bersaing dengan **pasukan NATO yang terkoordinasi** – terutama yang beroperasi di bawah Pasal 5 dan didukung oleh legitimasi politik **pembelaan diri kolektif**.

Di bawah tekanan seperti itu, **Israel akan terpaksa mundur** – tidak hanya mencabut pengepungan Gaza tetapi juga **menarik diri dari sebagian atau seluruh Tepi Barat**, sesuai dengan **pendapat penasihat ICJ tahun 2024**, yang secara eksplisit menyatakan pendudukan Israel ilegal dan memerintahkan negara-negara anggota untuk **mengakhiri dukungan terhadapnya**.

Dampak: Melegalkan Hasil melalui “Bersatu untuk Perdamaian”

Setelah debu mereda, koalisi negara-negara yang sama yang bertindak dalam pembelaan diri kolektif dapat mengajukan **resolusi “Bersatu untuk Perdamaian”** ke Majelis Umum – secara retrospektif:

- **Mendukung operasi multinasional**, dan
- **Mengesahkan misi penjaga perdamaian PBB resmi** di Palestina, termasuk **Gaza dan Tepi Barat**.

Ini akan menawarkan kerangka hukum internasional – meskipun rapuh – untuk:

- Mengakhiri pengepungan,
- Melindungi warga sipil Palestina,
- Membongkar pemukiman ilegal, dan
- Membangun kembali institusi masyarakat sipil Palestina yang hancur.

Titik Balik di Timur Tengah – dan dalam Hukum Internasional

Jangan salah: tidak ada jaminan untuk semua ini. Risiko eskalasi, kesalahan perhitungan, dan reaksi balik adalah nyata. Namun, **krisis Armada Sumud**, jika salah ditangani oleh Israel, dapat menandai awal dari **perubahan bersejarah** – tidak hanya dalam keseimbangan kekuatan di kawasan, tetapi dalam penerapan **hukum internasional** itu sendiri.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, **negara seperti Spanyol** – didukung oleh sekutu Eropa, mitra mayoritas Muslim, dan massa kritis dukungan publik – dapat menarik garis merah yang telah absen dari hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina.

Ini bukanlah kehancuran Israel. Tetapi ini bisa menjadi **akhir dari kemampuan Israel untuk menghancurkan Gaza tanpa konsekuensi**.

Dan mungkin, dari abu Gaza, dunia akhirnya dapat membangun kerangka yang membuat genosida di masa depan tidak hanya ilegal – tetapi juga tidak mungkin.